



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PUBLIC HEARING KOMISI VII DPR RI
DENGAN
TIM PAPUA MENGGUGAT PT FREEPORT INDONESIA**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: II
Jenis Rapat	: Public Hearing
Dengan	: Tim Papua menggugat PT Freeport Indonesia
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 25 November 2015
Waktu	: Pukul 15.00 WIB s.d 16.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Ketua Rapat	: Tony Wardoyo (Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan)
Sekretaris Rapat	: Dwiyanti, S.Sos.
Hadir Anggota	: ... Orang dari 49 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin
Acara	: 1. Konsultasi terkait PT Freeport Indonesia 2. Dan lain-lain.

CATATAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Public Hearing Komisi VII DPR RI pada Hari Rabu, tanggal 25 November 2015 dibuka pukul 15.00 WIB yang dipimpin oleh Tony Wardoyo Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan, dan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Public Hearing Komisi VII DPR RI dengan acara, Konsultasi terkait PT Freeport Indonesia dan lain-lain.

II. CATATAN

1. Komisi VII DPR RI menerima masukan dari Tim Papua Menggugat PT. Freeport Indonesia terkait PT. Freeport Indonesia, untuk kemudian ditindaklanjuti pada Kementerian terkait.
2. Tim Papua Menggugat PT. Freeport Indonesia menyampaikan beberapa hal penting yang menjadi tuntutan utama, diantaranya:
 - a. Hentikan proses perpanjangan Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia

- b. Stop operasi PT. Freeport Indonesia di Tembagapura
 - c. Lakukan perundingan baru antara Freeport Mc Moran dengan rakyat papua
3. Selain itu, Tim Papua Menggugat PT. Freeport Indonesia meminta agar:
- a. PT. Freeport menghargai hak orang Papua sebagai pemilik tambang terbesar di dunia.
 - b. PT. Freeport memberikan saham bagi orang Papua.
 - c. Nama PT. Freeport Indonesia diganti menjadi PT. Freeport Papua
 - d. Pimpinan tertinggi PT. Freeport Indonesia harus orang asli Papua.
 - e. Pembangunan Smelter harus dibangun di Timika Papua.
 - f. Mempekerjakan semua pengangguran dan pencari kerja serta tuntaskan masalah-masalah yang dialami seluruh pekerja/buruh sebagai anggota ormas Komite Pencari Kerja (KPKB) Kabupaten Mimika di bawah koordinasi PKPB.
4. Terkait tuntutan Tim Papua Menggugat PT. Freeport Indonesia, Komisi VII DPR RI saat ini sedang melakukan revisi UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan apa yang menjadi tuntutan Tim Papua Menggugat PT. Freeport Indonesia akan diakomodir didalam revisi UU Minerba.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 16.00 WIB

Jakarta, 25 November 2015

KETUA RAPAT,


TONY WARDOYO

KEPADA
Yth. Ketua Komisi VII DPR-RI

PAPUA MENGGUGAT FREEPORT

Nomor : 01/PMF/JKT/IX/2015

Jakarta, 24 November 2015

Lampiran : -

Perihal : **Pemberitahuan Rencana penyampaian Apirasi Rakyat Papua di Muka Umum Terhadap PT. Freeport Indonesia Tembagapura**

Kepada Yth :

1. **Bapak Presiden Republik Indonesia**
2. **Bapak KAPOLRI**
3. **Bapak KAPOLDA Metro Jaya**

Di -

Jakarta

Dengan Hormat,

Freeport Mc. Moran masuk di Tembagapura Tanah Papua sejak tahun 1967 tidak memiliki keabsahan hukum yang jelas atau tanpa izin kepada pemilik hak ulayat orang Papua dan Sampai saat ini tidak memberikan dampak positif bagi rakyat Papua karena hanya menimbulkan berbagai macam persoalan sosial, Politik, Keamanan, Hak Asasi Manusia (HAM), Ekonomi, Ketenagakerjaan, Hukum dan Lingkungan Hidup. Bahkan perusahaan asing asal Amerika ini sama sekali tidak memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh orang Papua dan rakyat Indonesia pada umumnya sesuai tujuan pembangunan nasional akan tetapi sebaliknya memiskinkan dan mengintimidasi orang Papua diatas kekayaannya sendiri.

Hal ini disebabkan karena orang asli Papua sendiri tidak pernah ditempatkan sebagai pemilik saham sehingga tidak dilibatkan dalam segala bentuk forum pengambilan keputusan tentang kebijakan PT. Freeport sejak eksplorasi dan eksploitasi sampai saat ini.

Segala upaya telah dilakukan oleh orang Papua sebagai Pemilik Hak ulayat untuk menentukan perubahan di PT. Freeport, namun belum berhasil karena itu melalui kesempatan ini kami informasikan kepada bapak-bapak yang terhormat bahwa sebagian komunitas orang Papua dan simpatisan se JABODETABEK akan melakukan penyampaian Pendapat dimuka umum secara langsung kepada para pihak penentu kebijakan yang telah kami sebutkan diatas

dengan harapan akan memperoleh kepastian Hukum dan perubahan bagi nasib orang Papua dan rakyat Indonesia atas kekayaannya sendiri berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 3

Segala bentuk rencana dan jenis-jenis kegiatan ini semuanya tersusun secara sistematis sebagai berikut:

I. Dasar Hukum

- A. Pancasila
- B. UUD 1945
- C. UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- D. UU No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua
- E. UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum

II. Isi Tuntutan Utama Demonstrasi

1. Hentikan proses perpanjangan kontrak karya PT. Freeport
2. Stop operasikan PT. Freeport Indonesia di Tembagapura
3. Lakukan perundingan baru antara Freeport Mc. Moran dengan rakyat Papua

III. Latar Belakang, Maksud Dan Tujuan

A. Latar Belakang

1. Emas Papua di PT. Freeport Indonesia Tembagapura sangat melimpah tetapi Rakyat Papua Miskin diatas kekayaan sendiri.
2. Lingkungan alam seluruh area penambangan PT. Freeport dari Tembagapura sampai wilayah perairan laut arafuru telah rusak akibat eksploitasi dan tercemar oleh limbah produksi penambangan.
3. Rakyat Papua tidak menjadi pemilik Saham di PT. Freeport
4. Kabupaten Mimika Papua memiliki potensi lapangan pekerjaan yang sangat luas di Papua karena ada PT. Freeport, privatisasi dan kontraktor serta pelaku usaha lainnya namun tidak ada perhatian bagi tenaga kerja yang belum mendapat pekerjaan di Timika.
5. Dominasi kesempatan kerja terus menerus dari luar kabupaten Mimika masuk menguasai semua lowongan pekerjaan di Timika tanpa memberi kesempatan yang baik kepada tenaga keraja yang berada di Timika.
6. Semua proses perekrutan yang dilakukan hanya formalitas namun prioritasnya sudah tersedia bagi semua tenaga kerja/para pencari kerja yang berada di dalam 7 (tujuh) kelompok system besar yakni Sukuisme, Nepotisme, Kulusi, Koneksi, Suap (menggunakan uang), Jabatan (jatah pejabat/para tokoh) dan penghargaan jasa (jatah pekerja/pejabat senior).

Proses ini dipolitisir dalam bentuk persyaratan seleksi dan kompetensi yang ketat untuk membatasi tenaga kerja di luar kelompok system tersebut dan hal ini telah banyak menunjukkan diskriminasi ketidakadilan kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya Papua.

B. Maksud

1. Tim RAKYAT PAPUA MENGGUGAT dibentuk agar dapat mengangkat dan menyelesaikan secara tuntas semua persoalan PT. Freeport terhadap orang Papua sebagai pemilik Emas terbesar di dunia.
2. Menyuarakan masalah hak ulayat yang diperjuangkan oleh masyarakat adat pemilik hak ulayat.
3. Mengangkat permasalahan ketidakadilan dibidang ketenagakerjaan, Kesejahteraan dan Hukum yang dialami masyarakat secara langsung untuk disampaikan kepada bapak Presiden Republik Indonesia di istana Negara, ketua DPR RI, Pimpinan PT. Freeport Indonesia dan perwakilan PBB di Indonesia.

C. Tujuan

1. PT.Freeport harus menghargai hak orang Papua sebagai pemilik tambang terbesar di dunia
2. Menghargai hak orang Papua pemilik hak ulayat
3. PT. Freeport memberikan saham bagi orang Papua
4. Pimpinan tertinggi PT. Freeport Indonesia harus orang asli Papua
5. Smelter harus bangun di Timika Papua
6. Mempekerjakan semua pengangguran dan pencari kerja serta tuntaskan masalah-masalah yang dialami seluruh pekerja/buruh sebagai anggota ormas Komite Pencari Kerja (KPKB) kabupaten Mimika dibawah koordinasi KPKB.
7. Menunjuk KPKB sebagai mitra pemerintah untuk mengawasi kegiatan ketenagakerjaan
8. Menunjuk KPKB untuk mengeluarkan surat pengantar atau rekomendasi sebagai salah satu syarat utama kepada setiap calon karyawan dalam penerbitan ID card di card center PT. Freeport Indonesia (PT. FI) Tembagapura, Kuala Kencana dan Jakarta serta semua jenis kegiatan yang mempekerjakan tenaga kerja/buruh di kabupaten Mimika sehingga bisa diketahui dengan jelas dan pasti jumlah semua tenaga kerja yang di rekrut dari Timika dan luar Timika demi mencapai perluasan dan penempatan tenaga kerja yang adil merata secara nasional maupun daerah
9. Menunjuk KPKB sebagai penyeimbang dari masyarakat untuk turut serta secara independen dalam penyelesaian semua permasalahan terkait Ketenagakerjaan, Kesejahteraan dan Hukum di kabupaten Mimika berdasarkan ketentuan BAB VI PENEMPATAN TENAGA KERJA dan BAB VII PERLUASAN KESEMPATAN KERJA UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pasal 41 ayat 1 dan 2 yang

menyatakan bahwa *pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawasi pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja yang ditetapkan oleh pemerintah*, sehingga masyarakat tidak dikorbankan secara terus menerus karena lemahnya pengawasan yang belum adil dan merata sesuai pertimbangan presiden dalam undang-undang tersebut.

D. Harapan

1. Bapak presiden RI dan ketua DPR RI di Jakarta dapat menerima, mendengar dan mengambil keputusan secara langsung terhadap aspirasi yang kami sampaikan.
2. Bapak presiden dapat menuntaskan semua masalah terkait PT. Freeport di kabupaten Mimika, provinsi papua dan Indonesia pada umumnya sehingga akhir kepemimpinan bapak Presiden, seluruh rakyat Indonesia sudah menjadi makmur dan bebas dari segala bentuk kemiskinan.

IV. Koordinator Lapangan

1. Kio Lokobal no HP 081314740156
2. Azis Manu no HP 082110310820
3. Willy Kogoya no HP 081322213322
4. Danus Kogoya no HP 085311380765
5. Enson Wetapo no HP 085284648924

V. Jumlah peserta

- A. Peserta kegiatan berjumlah 500 orang
- B. Tidak menutup kemungkinan jumlah peserta akan dapat bertambah saat kegiatan berlangsung sampai mencapai 1000 orang

VI. Tempat kegiatan

- Kegiatan dapat dilaksanakan di tiga tempat:
- A. Istana Negara Republik Indonesia Jakarta
 - B. Kantor DPR Republik Indonesia

VII. Waktu pelaksanaan

- A. Hari Rabu, 25 November 2015 jam 09.00 WIB
- B. Jadwal kegiatan dan rute kegiatan
 1. Jadwal kegiatan
 - a. Jam 08.00-10.00 WIB di depan Istana Negara Jakarta
 - b. Jam 13.00-15.00 WIB di depan kantor DPR RI Jakarta
 2. Rute Kegiatan
 - a. Bergerak dari Rumah menuju istana presiden RI
 - b. Bergerak dari Istana Presiden menuju kantor DPR RI

VIII. Bentuk Kegiatan

Penyampaian aspirasi kepada bapak Presiden Republik Indonesia, ketua DPR RI, pimpinan PT. Freeport Indonesia dan perwakilan PBB dengan cara demonstrasi.

- IX. Alat peraga
- A. Spanduk dan baliho 10 buah
 - B. Pamphlet 20 buah
 - C. Brosur 10.000 lembar
 - D. Mobil sown system 1 buah
 - E. Bus angkut masa dari titik kumpul 10 buah

Demikian pemberitahuan kami, atas kerja samanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

PAPUA MENGUGAT FREEPORT

Penanggung jawab Demonstrasi,



Danny Wenda
082213373732



Yusuf Manu
081213271770